



BUPATI NGADA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2016  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 10 Seri E Nomor 2 );
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2010 Nomor 1 Seri E Nomor 1 );
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2015 Nomor 3 );

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 13 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA

dan

BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada berupa laporan keuangan memuat :
- a. Neraca;
  - b. Laporan realisasi anggaran;
  - c. Laporan Operasional;
  - d. Laporan Arus Kas;
  - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan;

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.786.700.372.942,00
b. Belanja	<u>Rp.832.825.452.465,07 (-)</u>
Surplus	Rp.46.125.079.523,07
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 89.775.832.529,57
2. Pengeluaran	<u>Rp. 1.000.000.000,00 (-)</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 88.775.832.529,57

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 35.826.014.809,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.822.526.387.751,00
2. Realisasi	<u>Rp.786.700.372.942,00 (-)</u>
Selisih Lebih	Rp. 35.826.014.809,00

b. Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 78.498.707.313,93 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.911.324.159.779,00
2. Realisasi	<u>Rp.832.825.452.465,07 (-)</u>
Selisih Kurang	Rp. 78.498.707.313,

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 42.672.692.504,93 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp.(88.797.772.028,00)
--------------------------------------	------------------------

2. Realisasi Rp. 46.125.079.523,07 (-)

Selisih Lebih Rp. 42.672.692.504,93

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp21.939.498,43 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 89.797.772.028,00

2. Realisasi Rp. 89.775.832.529,57 (-)

Selisih Lebih Rp. 21.939.498,43

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 1.000.000.000,00

2. Realisasi Rp. 1.000.000.000,00 (-)

Selisih Kurang Rp. 00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 21.939.498,43 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 88.797.772.028,00

2. Realisasi Rp. 88.775.832.529,57 (-)

Selisih Lebih Rp. 21.939.498,43

#### Pasal 4

(1) Berdasarkan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. jumlah aset Rp. 1.193.513.423.330,52

b. jumlah hutang Rp. 10.682.249.341,40

c. jumlah ekuitas dana Rp.1.182.831.173.989,12

(2) Berdasarkan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas pada tanggal 31 Desember 2016 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp 47.117.365.490,90 dengan rincian sebagai berikut :

a. saldo Kas 1 Januari 2015	Rp. 84.243.372.531,97
b. bagian kas daerah – Dana Kapitasi JKN	Rp. 1.407.094.207,00
c. bagian kas daerah-BLUD RSUD	Rp. 5.010.511.913,00
d. bagian kas Dana BOS	Rp. 2.124.190.696,00
e. kas di bendahara Pengeluaran	Rp. 3.064.714.828,00
f. kas di bendahara Penerimaan	Rp. 9.094.300,00
g. aliran Kas dari Aktivitas Operasi	Rp. 204.998.010.230,27
h. aliran Kas dari Aktivitas Investasi	Rp. (219.477.788.347,34)
i. aliran Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp. 3.060.500,00
j. aliran Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp. (34.264.895.368,00)
k. saldo Kas 31 Desember 2016	Rp. 47.117.365.490,90

Pasal 5

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

- Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran II Neraca Daerah; dan
- Lampiran III Laporan Arus Kas.

(2) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa

pada tanggal 15 Agustus 2017

BUPATI NGADA,

ttd

MARIANUS SAE

Diundangkan di Bajawa

pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

ttd

MEDA MOSES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2017 NOMOR 1

NOMOR REG.PERDA KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 01 / 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
YOHANES GHAE, SH

PEMBINA TK.I

NIP.196809161999031009